

**PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP
TAX AVOIDANCE DENGAN SIZE SEBAGAI
VARIABEL MODERASI**

ARTIKEL ILMIAH



Oleh :

RARAS WANUDYANINGRUM
NIM : 2014310115

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2018**

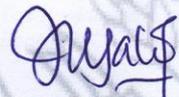
PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Raras Wanudyaningrum
Tempat, Tanggal Lahir : Nganjuk, 27 Maret 1996
N.I.M : 2014310115
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Sarjana
Konsentrasi : Audit dan Perpajakan
Judul : Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance dengan Size sebagai Variabel Moderasi.

Disetujui dan diterima baik oleh:

Dosen Pembimbing,
Tanggal : 18 April 2018

Co. Dosen Pembimbing,
Tanggal : 17 April 2018



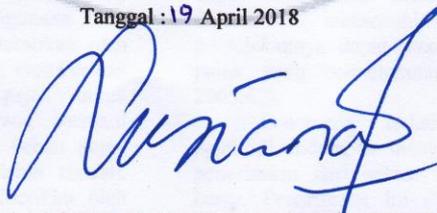
(Divah Pujiati, SE., M.Si)



(Nur'aini Rokhmania, SE., Ak., M.Ak)

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi

Tanggal : 19 April 2018



(Dr. Luciana Spica Almiliana, S.E., M.Si., OIA, CPSAK)

**PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP
TAX AVOIDANCE DENGAN SIZE SEBAGAI
VARIABEL MODERASI**

Raras Wanudyaningrum

STIE Perbanas Surabaya

E-Mail : larasningrum34@gmail.com

Jl. Nginden Semolo 34-36, Surabaya

ABSTRACT

The use of self assessment system in Indonesia to deliver benefits taxpayer to calculate the taxable income to minimum. One of the actions taken by taxpayers to reducing or minimizing duty tax carefully to take advantage loopholes of tax law. This research has a purpose analyzed and verify about corporate governance of institutional ownership, independent board of commissioners, and audit committee to tax avoidance with size as moderating variable. The subjects of this research is mining companies which are listed on Indonesia Stock Exchange in 2012-2016 periods. The sample is determined by purposive sampling technique, then obtained 90 samples as observation research. Data were analyzed by multiple linear regression analysis method and residual test to test the moderation variable. The results of this research are institutional ownership negatively affects tax avoidance. The independent board of commissioners, and the audit committee does not affect to tax avoidance. In addition, firm size is not proved as a moderating variable in the relationship between corporate governance components and tax avoidance.

Keywords : Tax Avoidance, Corporate Governance, Institutional Ownership, Independent Board Of Commissioners, Audit Committee, Size.

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia memberikan wewenang dan kewajiban kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar serta melaporkan penghasilan kena pajaknya sendiri atau biasa disebut dengan *self assesstment system*. Penggunaan *self assesstment system* yang diterapkan oleh Indonesia ini dapat memberikan keuntungan bagi wajib pajak untuk mengkalkulasikan pajak yang menjadi seminimal mungkin supaya beban pajak yang ditanggung menjadi lebih rendah. Pembebanan pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari pengabdian kewajiban dan partisipasi

wajib pajak untuk meningkatkan laju pertumbuhan dan pembangunan negara. Namun, pajak bukanlah iuran yang sifatnya sukarela melainkan iuran yang dapat dipaksakan sehingga kesalahan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat memberatkan wajib pajak yang bersangkutan (Mohammad, 2005:43).

Fenomena terkait pemungutan pajak di Indonesia menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor pajak sangatlah besar. Penerimaan ini digunakan untuk meningkatkan laju pertumbuhan dan pembangunan negara sehingga harus dikelola dengan baik oleh pemerintah atau ditingkatkan dengan optimal supaya

pertumbuhan serta pembangunan negara dapat berjalan baik. Dengan demikian pemerintah berharap wajib pajak dapat patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela dan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Namun, apa yang diharapkan oleh pemerintah pada kenyataannya tidak sesuai dengan realita yang ada. Rendahnya penerimaan pajak yang ada di Indonesia menggambarkan bahwa harapan pemerintah untuk wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya masih belum tercapai. Optimalisasi pemungutan pajak di Indonesia masih mengalami kendala, hal tersebut menyebabkan efektivitas pemungutan pajak terus mengalami penurunan dari tahun 2013 hingga 2016 yang ditunjukkan pada Tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak
(dalam triliun rupiah)

Tahun	2013	2014	2015	2016
Target	995,21	1.072,37	1.294,26	1.355,20
Realisasi	921,27	981,83	1.060,83	1.105,81
Capaian	92,57%	91,56%	81,96%	81,60%

Sumber : www.pajak.go.id, diolah

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa penerimaan dari sektor pajak yang seharusnya diterima negara tidak sebesar pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh wajib pajak yang berusaha untuk membuat kewajiban perpajakannya menjadi lebih rendah dengan melakukan praktik *tax avoidance*. Menurut Jacob (2014), *Tax Avoidance* atau penghindaran pajak merupakan suatu tindakan untuk melakukan pengurangan atau meminimalkan kewajiban pajak dengan hati-hati dan mengatur sedemikian rupa untuk mengambil keuntungan dari celah-celah dalam ketentuan hukum pajak. Praktik *tax avoidance* dilakukan oleh wajib pajak tidak secara pasti melanggar undang-

undang akan tetapi tidak sesuai dengan tujuan undang-undang. Praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan hanya untuk meminimalisasi kewajiban pajak yang dianggap legal yang membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya. Oleh karena itu persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang unik dan rumit karena disatu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum namun disisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah.

Penelitian ini menggunakan perusahaan pertambangan sebagai objek penelitiannya. Alasan utama yang menjadi pertimbangan peneliti memilih sektor tambang karena sektor ini menjadi bahan perbincangan terkait kepatuhan pajaknya yang tergolong rendah dan menurun dari waktu ke waktu.

Permasalahan yang hendak dijawab oleh peneliti yaitu apakah kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit sebagai karakteristik dari *corporate governance* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dengan *size* sebagai variabel moderasi. Penelitian ini juga bertujuan untuk menguji pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* dengan *size* sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 2012-2016.

KERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI DAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Pemikiran *corporate governance* bertumpu pada teori keagenan, yaitu pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku (Wolfensohn, 1999). Teori Keagenan menjelaskan adanya konflik yang akan timbul antara pemilik dengan manajemen perusahaan. Konflik ini disebut *agency problem*

(Jensen dan Meckling, 1976). Pada umumnya pihak agen ingin memaksimalkan dirinya supaya dapat terus memenuhi kontrak perjanjian. Rahmawati (2012:97) juga berpendapat bahwa hubungan agensi terjadi ketika pemilik perusahaan mengontrak agen atau mempekerjakan manajer untuk mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan dan memberikan jasanya.

Tax Avoidance

Penghematan pajak dapat dilakukan secara legal dengan cara melakukan manajemen pajak. Cara untuk meminimumkan kewajiban pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan ataupun yang melanggar peraturan perpajakan. Istilah yang sering digunakan adalah *tax evasion* dan *tax avoidance*. Kedua cara tersebut merupakan kegiatan pengurang pajak, namun jika dilihat dari segi hukum *tax avoidance* bukan merupakan pelanggaran karena menggunakan celah-celah hukum yang bisa digunakan untuk mengurangi pajak. Metode dan teknik penghindaran pajak dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang dan peraturan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Dalam konteks internasional, *tax avoidance* biasanya dilakukan perusahaan dengan cara *transfer pricing*. Berbeda dengan *tax avoidance*, *tax evasion* atau penggelapan pajak merupakan penghindaran pajak yang dilakukan dengan melanggar hukum, khususnya undang-undang pajak dan undang-undang pidana serta perdata. *Tax evasion* biasa dilakukan perusahaan dengan cara membuat faktur palsu, tidak mencatat sebagian penjualan, atau laporan keuangan yang dibuat palsu. Namun cara seperti itu mudah diketahui, karena itu modus penggelapan pajak sekarang berubah. Sekarang banyak perusahaan melaporkan pajaknya relatif kecil, sehingga akan ada

pemeriksaan oleh aparat pajak. *Tax evasion* juga akan membawa akibat yang buruk yaitu dana pajak yang seharusnya diterima oleh negara untuk membangun fasilitas umum, membiayai kegiatan pemerintahan tidak sampai pada negara, sehingga akan menghambat pembangunan, hak rakyat miskin untuk memperoleh subsidi dari negara tidak bisa diwujudkan. Dan masih banyak hal yang akan terhambat karena dana dari pembayaran pajak tidak masuk keuangan negara.

Corporate Governance

Good Corporate Governance secara definitif merupakan sebuah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan suatu nilai tambah (*value added*) untuk semua pemegang saham (Desai dan Dharmapala, 2007). *Corporate governance* didefinisikan sebagai efektivitas mekanisme yang bertujuan untuk meminimumkan konflik keagenan dengan penekanan khusus pada mekanisme legal yang mencegah dilakukannya ekspropriasi atas pemegang saham minoritas (Tommy dan Maria, 2013). Schon (2008) menyatakan bahwa peraturan *corporate governance* dijadikan pemerintah sebagai alat untuk memerangi *tax avoidance* yang telah dilakukan oleh perusahaan.

Corporate governance dibagi dalam tiga bagian, yaitu: struktur kepemilikan, struktur dewan, dan transparansi informasi. Variabel yang digunakan sebagai proksi *corporate governance* secara terpisah untuk struktur kepemilikan yaitu kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial, sedangkan untuk struktur dewan yaitu jumlah dewan komisaris dan komite audit. Transparansi informasi dapat diukur dengan kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Sekar (2003) mengungkapkan bahwa pengukuran kualitas audit dapat dilakukan dengan menggunakan proksi spesialisasi industri dan ukuran KAP. Variabel yang digunakan penelitian ini sebagai proksi dari *corporate*

governance antara lain kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit.

Size atau Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar atau kecil berdasarkan total aktiva. Ukuran perusahaan dapat menentukan besar kecilnya nilai total aktiva yang dimiliki perusahaan dimana semakin besar total aktiva perusahaan maka akan meningkat juga jumlah produktifitas perusahaan tersebut. Hal itu akan menghasilkan laba yang semakin meningkat dan memengaruhi tingkat pembayaran pajak. Semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah CETR yang dimilikinya, hal ini dikarenakan perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik. Namun, perusahaan tidak selalu dapat menggunakan kekuatan yang dimilikinya untuk melakukan perencanaan pajak karena adanya batasan berupa kemungkinan menjadi sorotan dan sasaran dari keputusan regulator-*political cost theory* (Watts dan Zimmerman, 1986).

Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*

Adanya kepemilikan institusional yang tinggi akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja perusahaan dan dapat mengurangi adanya konflik antar manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada seberapa besar investasi yang dilakukan oleh investor. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin kuat pengendalian yang dapat dilakukan oleh pihak eksternal terhadap perusahaan. Jika pengendalian yang dilakukan oleh pemilik institusional semakin kuat, maka perilaku manajemen internal perusahaan untuk melakukan kecurangan penggelapan keuangan termasuk penghindaran pajak

akan semakin kecil. Jadi, perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang tinggi cenderung akan melakukan pelaporan keuangan yang baik termasuk untuk tidak melakukan *tax avoidance*.

Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Dewan komisaris independen memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan, membantu dalam pengelolaan perusahaan dengan baik, dan membuat laporan keuangan perusahaan yang lebih objektif. Menurut (Gideon, 2005), Dewan Komisaris Independen dalam melaksanakan fungsi pengawasan dapat mempengaruhi pihak manajemen menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Jadi, semakin besar jumlah dewan komisaris independen pada dewan komisaris, maka akan semakin baik mereka bisa memenuhi peran dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutif sehingga dapat meminimalisir adanya kecurangan yang mungkin terjadi dalam pelaporan perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan kemudian aktivitas penghindaran pajak dapat menurun. Berikut ini beberapa penelitian terkait dewan komisaris independen yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. I Gusti dan Ketut (2014) dan Kesit Bambang Prakosa (2014) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Adanya komite audit pada perusahaan berperan untuk mendukung komisaris dalam mengawasi dan melakukan kontrol terhadap manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan dan memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Para dewan perusahaan sering memberikan tanggung

jawab kepada komite audit terhadap kesalahan pelaporan keuangan agar laporan keuangan dapat dipercaya. Berjalannya fungsi komite audit secara efektif dapat memungkinkan pengendalian dan laporan keuangan perusahaan yang lebih baik. Oleh karena itu, dengan adanya komite audit dapat mengurangi terjadi kecurangan penghindaran pajak perusahaan karena komite audit dapat memonitoring mekanisme yang dapat memperbaiki kualitas informasi bagi pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan.

Vivi Adeyani (2014) dan Ayu dan Kurniasih (2012) menyatakan bahwa pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* adalah berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* sehingga semakin banyak jumlah komite audit maka akan mengurangi tindakan *tax avoidance*. I Gusti dan Alit (2014) menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh yang negatif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Size Terhadap Hubungan Antara Komponen Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance

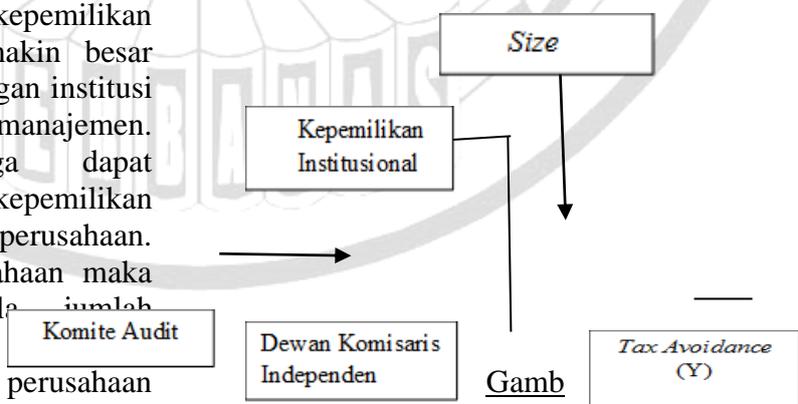
Peraturan *corporate governance* telah dijadikan pemerintah sebagai alat untuk memerangi *tax avoidance* yang telah dilakukan perusahaan. Kepemilikan institusional dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan monitoring terhadap perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin besar pula kekuatan suara dan dorongan institusi untuk mengawasi pihak manajemen. Ukuran perusahaan juga dapat mempengaruhi jumlah kepemilikan institusional dalam sebuah perusahaan. Semakin besar sebuah perusahaan maka akan semakin besar pula jumlah kepemilikan institusionalnya, semakin rendah peluang perusahaan tersebut untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

Dewan komisaris independen dapat melakukan monitoring untuk mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan

menjadikan laporan keuangan menjadi lebih objektif (Tommy dan Maria, 2013). Semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar jumlah dewan komisaris independen dan *tax avoidance* akan semakin rendah.

Komite audit berfungsi memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian internal perusahaan (Sekar Mayangsari, 2003). Berjalannya fungsi komite audit secara efektif memungkinkan pengendalian perusahaan dan laporan keuangan yang lebih baik serta mendukung GCG (Ni Ketut, 2008). Semakin besar ukuran sebuah perusahaan, maka jumlah komite audit yang ada dalam perusahaan tersebut tentunya akan semakin besar pula, dan akan semakin rendah peluang untuk melakukan praktik *tax avoidance* pada perusahaan tersebut.

Berdasarkan uraian teoritis dan beberapa uraian penelitian terdahulu, dalam penelitian ini *corporate governance* diukur dengan tiga indikator, yaitu kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit sebagai variabel independen serta *size* atau ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi yang mempengaruhi *tax avoidance* sebagai variabel dependen. Maka dapat dibangun kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1

Kerangka Pemikiran Berdasarkan kerangka teoritis hubungan antar variabel diatas, maka

hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

- H1 : Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.
- H2 : Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.
- H3 : Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.
- H4 : *Size* berpengaruh sebagai variabel moderasi terhadap hubungan antara Kepemilikan Institusional dengan *tax avoidance*.
- H5 : *Size* berpengaruh sebagai variabel moderasi terhadap hubungan antara Dewan Komisaris Independen dengan *tax avoidance*.
- H6 : *Size* berpengaruh sebagai variabel moderasi terhadap hubungan antara Komite Audit dengan *tax avoidance*.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini bersifat kuantitatif dimana dilakukan pengujian terhadap angka dan analisisnya menggunakan uji statistik. Jenis sumber data yang diperoleh merupakan data sekunder yaitu data yang siap untuk digunakan dari sumber yang menerbitkannya. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Bursa Efek Indonesia.

BATASAN PENELITIAN

Terdapat beberapa batasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Periode waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah dimulai dari 2012 dan berakhir pada 2016.
2. Penelitian ini kan dibatasi pada pembahasan mengenai pengaruh variabel independen yang diteliti yaitu, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit yang merupakan proksi dari *corporate governance*.

3. Penelitian ini menggunakan sampel dari perusahaan pada sektor tambang yang masih aktif dan terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada 2012-2016.

DEFINISI OPERASIONAL DAN PENGUKURAN VARIABEL

Tax Avoidance

Tax Avoidance merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal, aktivitas ini dapat menimbulkan resiko untuk perusahaan seperti denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik (Kesit Bambang, 2014).

$CETR = \frac{\text{Pajak yang dibayarkan perusahaan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional merupakan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik institusi dan *blockholder* pada akhir tahun (Wahyudi dan Pawestri dalam Vivi Adeyani 2013).

$KI = \frac{JSI}{JSAT} \times 100\%$

Dimana:

JSI : Jumlah saham yang dimiliki institusional

JSAT : Jumlah saham beredar akhir tahun

Dewan Komisaris Independen

Dewan Komisaris Independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham minoritas dan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak manaoun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan (Agoes dan I Cenik Ardana 2014:110).

Menurut Sabila (2012) dewan komisaris independen dapat diukur dengan:

$$DKI = \frac{JKI \times 100\%}{JDK}$$

Dimana:

JKI : Jumlah komisaris independen

JDK : Jumlah anggota dewan komisaris yang ada

Komite Audit

Menurut Peraturan Nomor IX. 1.5 dalam lampiran Keputusan BAPEPAM No. Kep-29/PM/2004, komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

KA = Σ Anggota komite audit di perusahaan

Size

Size atau Ukuran perusahaan adalah skala perusahaan yang dilihat dari total aktiva perusahaan pada akhir tahun. Penelitian ukuran perusahaan dapat menggunakan tolak ukur aset. Hal ini karena total aset perusahaan bernilai besar maka dapat disederhanakan dengan mentransformasikan kedalam logaritma natural (Ghozali, 2006) sehingga size dapat dihitung dengan:

$$Size = \ln Total Assets$$

POPULASI, SAMPEL DAN TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel dari penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang masih aktif dan terdaftar di BEI pada 2012-2016.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan cara mengambil sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu.

1. Perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan yang masih aktif dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 2012-2016.

2. Perusahaan yang memiliki laporan tahunan dan keuangan yang masih lengkap.
3. Perusahaan yang memiliki laba atau keuntungan yang bernilai positif.
4. Perusahaan yang menggunakan tahun buku pada 31 Desember pada laporan keuangan tahunan.

TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif; uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas; analisis regresi linear berganda serta pengujian hipotesis (uji statistik F, koefisien determinasi dan uji statistik t).

Model regresi linier berganda dapat menggunakan rumus:

$$TA = \alpha + \beta_1 KI + \beta_2 DKI + \beta_3 KA + \varepsilon$$

Keterangan:

α : Konstanta Persamaan

Regresi

$\beta_1, 2, 3$: Koefisien Regresi

TA : *Tax Avoidance* (dihitung dengan menggunakan CETR)

KI : Kepemilikan Institusional

DKI : Dewan Komisaris Independen

KA : Komite Audit

ε : *Error term*

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

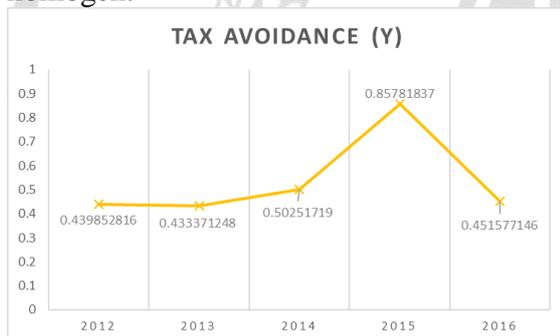
Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif menjelaskan data pada nilai *minimum*, *maximum*, *mean* dan *standar deviation*. Hasil olahan dari SPSS untuk analisis deskriptif menunjukkan bahwa :

Tax Avoidance

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sebanyak 90 perusahaan. Berdasarkan hasil olahan

SPSS dapat diketahui nilai minimum yang dimiliki oleh PT. ATPK Resources Tbk. (ATPK) pada tahun 2014 sebesar 0,0141616270 atau 1,416 persen, ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut cenderung melakukan *tax avoidance* karena hasil perhitungan CETR-nya sangat kecil. Sedangkan untuk nilai maksimumnya sebesar 3,1833490860 atau 318,335 persen dimiliki oleh PT. Ratu Prabu Energi Tbk. (ARTI) pada 2015. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut cenderung tidak melakukan *tax avoidance* karena hasil perhitungan CETR-nya besar. Kemudian untuk nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,523458530978, dan nilai standar deviasi sebesar 0,4580318157334. Dari tabel diatas dapat dinyatakan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata (*mean*) yang berarti bahwa tingkat sebaran data *tax avoidance* terbilang kecil atau bersifat homogen.



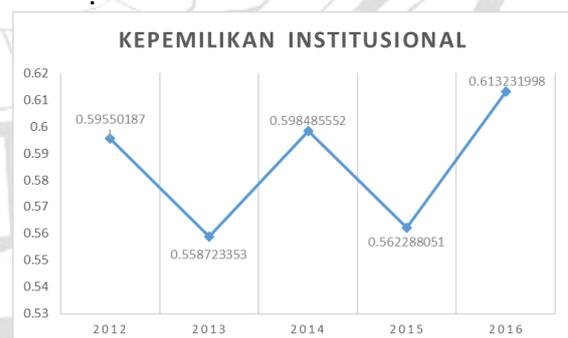
Gambar 2
Grafik Tax Avoidance

Gambar 2 menunjukkan bahwa perkembangan rata-rata *tax avoidance* dari perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode pengamatan. Pada gambar tersebut dapat dilihat terjadi peningkatan dan penurunan yang signifikan pada tahun 2015 dan 2016. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan sebesar 35,530 persen, hal ini terjadi karena jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan lebih besar dibandingkan laba sebelum pajak perusahaan. Hal ini menyebabkan nilai CETR yang besar dan menunjukkan bahwa pada tahun 2015 perusahaan-perusahaan cenderung untuk

tidak melakukan *tax avoidance*. Namun, pada tahun 2015 terjadi penurunan yang signifikan sebesar 40,624 persen. Ini menunjukkan bahwa banyak perusahaan memiliki jumlah pajak yang dibayarkan lebih kecil daripada jumlah laba sebelum pajak, ini menyebabkan nilai CETR rendah dan perusahaan cenderung melakukan praktik *tax avoidance*.

Kepemilikan Institusional

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sebanyak 90 perusahaan. Berdasarkan hasil olahan SPSS dapat diketahui nilai minimum kepemilikan institusional adalah sebesar 0,1144962220 atau 11,449 persen, nilai tersebut dimiliki oleh PT. Ratu Prabu Energi Tbk. (ARTI) pada tahun 2015. Kepemilikan institusional bernilai 0,1 karena pada tahun 2015 saham PT. Ratu Prabu Energi Tbk tidak banyak dimiliki oleh pihak institusi. Sedangkan nilai maksimum sebesar 0,9700000150 atau 97 persen dimiliki oleh PT. Golden Energy Mines Tbk (GEMS) pada tahun 2013. Nilai rata-rata (*mean*) dari kepemilikan institusional sebesar 0,587786004956. Nilai standar deviasi lebih kecil atau dibawah nilai rata-rata yang berarti tingkat sebaran data kepemilikan institusional terbilang kecil dan bersifat homogen.



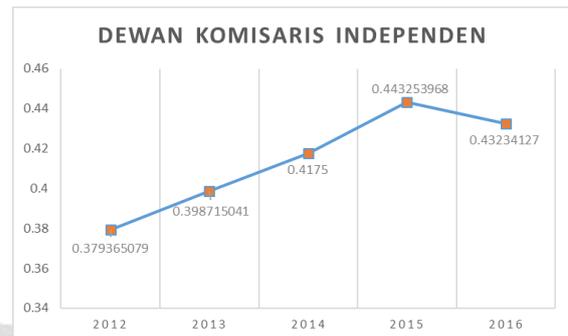
Gambar 3
Grafik Kepemilikan Institusional

Gambar 3 menunjukkan bahwa perkembangan rata-rata kepemilikan institusional dari perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode pengamatan.

Terlihat pada periode 2012-2016 terjadi peningkatan dan penurunan pada setiap tahunnya. Pada saat terjadi peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut pihak instansi atau lembaga lebih banyak memiliki saham perusahaan. Sebaliknya, jika terjadi penurunan maka hal ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut kepemilikan saham dari perusahaan pertambangan sedikit dimiliki oleh instansi atau lembaga manapun. Secara keseluruhan grafik rata-rata kepemilikan institusional cenderung tidak stabil atau mengalami kenaikan ataupun penurunan, artinya kepemilikan saham perusahaan oleh instansi atau lembaga tidak stabil.

Dewan Komisaris Independen

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sebanyak 90 perusahaan. Berdasarkan hasil olahan SPSS dapat diketahui nilai minimum dewan komisaris independen sebesar 0,1666666670 atau 16,667 persen dimiliki oleh PT. Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG) pada 2012. Hal ini dapat terjadi karena pada tahun tersebut perusahaan memiliki jumlah dewan komisaris independen yang sangat sedikit yaitu 1 orang. Perusahaan memiliki 1 orang dewan komisaris independen dari 6 orang anggota dewan komisaris yang dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan nilai maksimum sebesar 1,000000000 atau 100 persen dimiliki oleh PT. Resource Alam Indonesia Tbk (KKGI) pada 2016. Nilai ini diperoleh karena jumlah dewan komisaris independen yang dimiliki oleh perusahaan sama dengan jumlah dewan komisarisnya yaitu 1 orang. Nilai rata-rata (*mean*) dari dewan komisaris independen sebesar 0,523458530978. Nilai standar deviasi lebih kecil atau dibawah nilai rata-rata (*mean*) yang berarti tingkat sebaran data dewan komisaris independen terbilang kecil dan bersifat homogen.



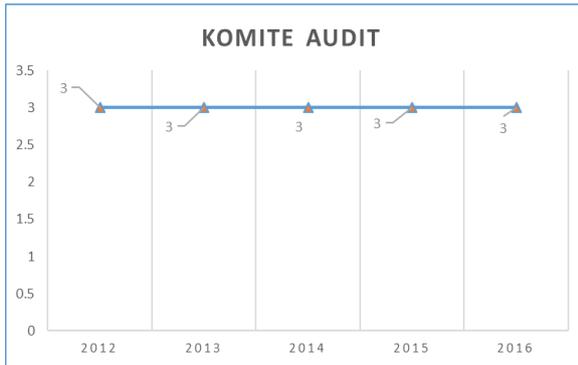
Gambar 4

Grafik Dewan Komisaris Independen

Gambar 4 menunjukkan bahwa perkembangan rata-rata dewan komisaris independen dari perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode pengamatan. Terlihat pada periode 2012-2016 terjadi peningkatan dari tahun 2012 hingga tahun 2015 sebesar 6,389 persen. Sedangkan penurunan terjadi pada tahun 2016 sebesar 1,091 persen.

Komite Audit

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sebanyak 90 perusahaan. Berdasarkan hasil olahan SPSS dapat diketahui nilai minimum komite audit sebesar 2 dimiliki oleh PT. Vale Indonesia Tbk. (INCO) pada 2014. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki jumlah komite audit yang sangat sedikit yaitu 2 orang. Sedangkan nilai maksimum sebesar 6 dimiliki oleh PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk. (ANTM) pada 2012, berarti jumlah komite audit yang dimiliki oleh perusahaan sebesar 6 orang. Nilai rata-rata (*mean*) dari komite audit sebesar 3,14. Nilai standar deviasi lebih kecil atau dibawah nilai rata-rata (*mean*) yang berarti tingkat sebaran data komite audit terbilang kecil dan bersifat homogen. Berikut merupakan rata-rata komite audit per tahun selama 2012-2016:

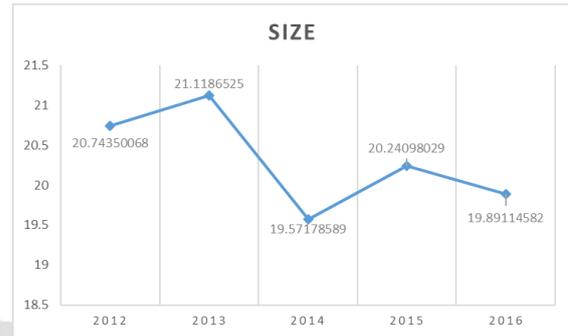


Gambar 5
Grafik Komite Audit

Gambar 5 menunjukkan bahwa perkembangan rata-rata komite audit dari perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode pengamatan. Terlihat pada tahun 2012 hingga tahun 2016 cenderung stabil. Hal ini berarti pada periode tersebut jumlah anggota komite audit dalam perusahaan pertambangan cenderung tidak berpengaruh dalam praktik *tax avoidance*.

Size

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sebanyak 90 perusahaan. Berdasarkan hasil olahan SPSS dapat diketahui nilai *size* sebesar 13,0556507600 dimiliki oleh PT. Petrosea Tbk. (PTRO) pada 2014. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki jumlah aset yang lebih kecil dibandingkan perusahaan lainnya. Sedangkan nilai maksimum dimiliki oleh PT. Golden Energy Mines Tbk. pada 2013 sebesar 29,0228982600, karena memiliki jumlah aset yang besar. Nilai rata-rata (*mean*) dari *size* sebesar 20,273179839889. Nilai standar deviasi lebih kecil atau dibawah nilai rata-rata (*mean*) yang berarti tingkat sebaran data komite audit terbilang kecil dan bersifat homogen.



Gambar 6
Grafik Size

Gambar 6 menunjukkan bahwa perkembangan rata-rata *size* dari perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode pengamatan, terlihat pada periode 2012-2016 terjadi peningkatan dari tahun 2012 ke tahun 2013 sebesar 37,515 persen. Penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2014 sebesar 154,686 persen. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah aset pada tahun tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan dan penurunan secara terus menerus selama periode 2012-2016.

UJI ASUMSI KLASIK

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi, variabel dependen dan variabel independen berdistribusi normal. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Data awal penelitian adalah sebanyak 93 sampel. Hasil uji normalitas setelah *outlier* menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Karena data masih belum normal maka data harus di *outlier* lagi hingga data menjadi normal. Namun setelah *outlier* yang kedua data masih tetap belum normal, namun datanya sudah Fit. Karena hal ini peneliti memutuskan untuk menggunakan hasil *outlier* yang kedua yang berjumlah 90 sampel. Hasil ini

merupakan kendala saat dilakukan uji hipotesis karena data yang disyaratkan harus terdistribusi normal.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (Imam, 2016:107). Penelitian ini menggunakan alat analisis *Run Test*.

Berdasarkan hasil olahan SPSS diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,832, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel independen (Imam, 2016:103). Multikolinearitas dapat dilihat berdasarkan nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Apabila nilai *tolerance* $\leq 0,10$ atau nilai VIF ≥ 10 , maka dapat disimpulkan ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Berdasarkan hasil olahan SPSS diperoleh nilai *tolerance* untuk semua variabel lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari sepuluh, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat adanya ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain dalam model regresi (Imam, 2016:134). Penelitian ini menggunakan Uji Glejser.

Berdasarkan olahan SPSS dapat disimpulkan bahwa terdapat variabel yang memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu Kepemilikan Institusional (KI)

hal ini menunjukkan bahwa terdapat heteroskedastisitas pada model regresi. Sedangkan untuk variabel Dewan Komisaris Independen (DKI) dan Komite Audit (KA) memiliki nilai signifikansi yang lebih dari 0,05, ini menunjukkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas pada model regresi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel atau bisa lebih. Analisis regresi berganda juga digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Berdasarkan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS 23, maka dari hasil olahan SPSS dapat disimpulkan bahwa hanya variabel kepemilikan institusional yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena memiliki nilai signifikansi yang kurang dari 0,05 ($0,013 \leq 0,05$). Berbeda dengan variabel dewan komisaris independen dan komite audit yang tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05. Maka didapatkan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$TA = 1,060 - 0,510 KI + 0,103 DKI - 0,089 KA + \epsilon$$

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa koefisien regresi kepemilikan institusional (KI) (X_1) sebesar 0,510 memperlihatkan bahwa setiap ada peningkatan pada variabel kepemilikan institusional (KI) meningkat satu satuan, maka *tax avoidance* akan naik sebesar 0,510.

UJI HIPOTESIS

Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah model regresi fit atau tidak. Uji F juga menunjukkan apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh secara

bersama-sama terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel 4.12 diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 2,743 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,048 \leq 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa model regresi *fit* dan dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit secara bersama-sama mempengaruhi variabel *tax avoidance*.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Jika nilai koefisien determinasi mendekati angka satu maka dapat dikatakan bahwa variabel independen dapat menerangkan variabel dependen dengan tingkat tinggi (kuat), namun apabila nilai koefisien determinasi mendekati angka nol maka dapat diartikan bahwa variabel independen dapat menerangkan variabel dependen dengan rendah (lemah).

Berdasarkan hasil olahan SPSS diketahui bahwa nilai *adjusted R square* sebesar 0,056. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 5,6 persen variabel independen yang terdiri dari kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit mampu menjelaskan variabel *tax avoidance*, sedangkan sisanya 94,4 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel independen yang diteliti. Selain itu nilai *adjusted R square* sebesar 0,056 memperlihatkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen rendah karena ≤ 50 persen.

Uji Statistik t

Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil pengujian statistik t menunjukkan bahwa :

a. Pengujian Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama dilakukan untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan tabel 4.14 diketahui nilai t sebesar -2,548 dengan nilai signifikansi sebesar 0,013. Tingkat signifikansi 0,013 lebih kecil dari 0,05 yang berarti kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* sehingga H1 diterima.

b. Pengujian Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua dilakukan untuk menguji pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan tabel 4.14 diketahui nilai t sebesar 0,283 dengan nilai signifikansi sebesar 0,778. Tingkat signifikansi 0,778 lebih besar dari 0,05 yang berarti dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sehingga H2 ditolak.

c. Pengujian Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga dilakukan untuk menguji pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan tabel 4.14 diketahui nilai t sebesar 0,987 dengan nilai signifikansi sebesar 0,326. Tingkat signifikansi 0,326 lebih besar dari 0,05 yang berarti komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sehingga H3 ditolak.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh instansi maupun lembaga (Savitri, 2016). Perusahaan dengan siklus arus kas yang besar cenderung sahamnya akan dimiliki berbagai instansi pemerintah maupun instansi swasta. Kepemilikan institusional dapat menjadi dorongan agar perusahaan dapat menyajikan laporan keuangan yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya kepada pemegang saham institusi, sehingga dapat meminimalisir atau bahkan meniadakan tindak

kecurangan dalam penyajian laporan keuangan yang hasilnya menjadi tidak berintegritas.

Hasil pengujian Uji Statistik t pada SPSS menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini didukung dari data deskriptif yang menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan memiliki nilai kepemilikan institusional yang tinggi. Nilai kepemilikan institusional yang tinggi disebabkan oleh jumlah saham yang banyak dimiliki oleh pihak institusi. Dari hasil Uji Statistik t diketahui bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* hal ini berarti semakin tinggi nilai kepemilikan institusional maka semakin rendah praktik *tax avoidance*. Jika pengendalian yang dilakukan oleh pemilik institusional semakin kuat, maka perilaku manajemen internal perusahaan untuk melakukan kecurangan penggelapan keuangan termasuk penghindaran pajak akan semakin kecil. Jadi, perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang tinggi cenderung akan melakukan pelaporan keuangan yang baik termasuk untuk tidak melakukan praktik *tax avoidance* atau penghindaran pajak.

Adanya tanggungjawab perusahaan untuk melakukan pelaporan keuangan yang baik kepada pemegang saham, maka pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan akan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham, sehingga perusahaan akan semakin berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan dengan tidak akan melakukan kecurangan atau penggelapan keuangan termasuk *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini sama seperti penelitian Sabar Warsini (2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil ini juga bertentangan dengan hasil penelitian I

Gusti dan Ketut (2014), Vivi Adeyani (2014), dan Nuralifmida Ayu dan Lulus Kurniasih (2012) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini didukung Teori Agensi karena dengan adanya kepemilikan institusional dalam perusahaan mampu mengurangi konflik kepentingan yang timbul dari hubungan keagenan antara manajemen dengan pemegang saham.

Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Dewan komisaris independen memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan, membantu dalam pengelolaan perusahaan dengan baik, dan membuat laporan keuangan perusahaan yang lebih objektif. Menurut (Gideon, 2005), Dewan Komisaris Independen dalam melaksanakan fungsi pengawasan dapat mempengaruhi pihak manajemen menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Jadi, semakin besar jumlah dewan komisaris independen pada dewan komisaris, maka akan semakin baik mereka bisa memenuhi peran dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan direktur eksekutif sehingga dapat meminimalisir adanya kecurangan yang mungkin terjadi dalam pelaporan perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan kemudian aktivitas penghindaran pajak dapat menurun.

Hasil pengujian Uji Statistik t pada SPSS menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini didukung dari data deskriptif yang menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan memiliki nilai dewan komisaris independen yang rendah. Nilai dewan komisaris independen yang rendah disebabkan oleh jumlah dewan komisaris yang banyak dimiliki oleh perusahaan. Dari hasil uji statistik t diketahui bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* hal ini berarti bahwa jumlah dewan komisaris independen tidak memiliki

pengaruh atas penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Dewan komisaris independen yang besar didalam perusahaan tidak efektif dalam upaya pencegahan praktik *tax avoidance*. Kemungkinan peran dewan komisaris independen dalam komponen *corporate governance* tidak menjalankan fungsi pengawasan dengan baik dalam pengambil keputusan pajak di perusahaan.

Hasil penelitian ini sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu dan Ketut Alit (2016) dan Nuralifmida Ayu dan Lulus (2012) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini tidak didukung oleh Teori Agensi karena dengan adanya salah satu komponen dari *corporate governance* yaitu dewan komisaris independen tidak menjadikan perusahaan menjadi lebih sehat atau baik. Adanya dewan komisaris independen tidak mempengaruhi perusahaan untuk menjalankan fungsi pengawasan dengan baik dalam pengambil keputusan pajak di perusahaan.

Pengaruh Komite Audit Terhadap Tax Avoidance

Adanya komite audit pada perusahaan berperan untuk mendukung komisaris dalam mengawasi dan melakukan kontrol terhadap manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan dan memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Para dewan perusahaan sering memberikan tanggung jawab kepada komite audit terhadap kesalahan pelaporan keuangan agar laporan keuangan dapat dipercaya. Berjalannya fungsi komite audit secara efektif dapat memungkinkan pengendalian dan laporan keuangan perusahaan yang lebih baik. Oleh karena itu, dengan adanya komite audit dapat mengurangi terjadi kecurangan penghindaran pajak perusahaan karena komite audit dapat

memonitong mekanisme yang dapat memperbaiki kualitas informasi bagi pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan.

Hasil pengujian Uji Statistik t pada SPSS menunjukkan bahwa variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini didukung dari data deskriptif yang menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan memiliki nilai komite audit yang rendah. Dari hasil Uji Statistik t diketahui bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* hal ini berarti bahwa jumlah komite audit yang ada pada perusahaan tidak memiliki pengaruh atas tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen. Kemungkinan peran komite audit dalam mengawasi dan melakukan kontrol terhadap manajemen tidak dapat berjalan dengan baik karena rendahnya komite audit yang dimiliki oleh perusahaan pertambangan periode 2012-2016.

Hasil ini bertentangan dengan penelitian Vivi Adeyani (2014) dan Ayu dan Kurniasih (2012) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini tidak didukung oleh Teori Agensi karena dengan adanya salah satu komponen dari *corporate governance* yaitu komite audit tidak menjadikan perusahaan menjadi lebih sehat atau baik. Adanya komite audit tidak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

Pengaruh Size sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara komponen Corporate Governance dengan Tax Avoidance

Peraturan *corporate governance* telah dijadikan oleh pemerintah sebagai alat untuk memerangi *tax avoidance* yang telah dilakukan perusahaan. Kepemilikan institusional dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan monitoring terhadap perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin besar pula kekuatan suara dan dorongan institusi

untuk mengawasi pihak manajemen. Ukuran sebuah perusahaan juga dapat mempengaruhi jumlah kepemilikan institusional dalam sebuah perusahaan.

Semakin besar sebuah perusahaan maka akan semakin besar pula jumlah kepemilikan institusionalnya, dan akan semakin rendah peluang perusahaan tersebut untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Hasil pengujian Uji Residual pada SPSS menunjukkan bahwa variabel *size* tidak dapat menjadi variabel moderasi dalam hubungan antara kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. Kemungkinan jumlah asset yang dimiliki oleh perusahaan dan jumlah kepemilikan institusional yang tidak stabil menyebabkan variabel *size* tidak dapat memoderasi hubungan antara kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.

Dewan komisaris independen dapat melaksanakan fungsi monitoring untuk mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan menjadikan laporan keuangan menjadi lebih objektif (Tommy dan Maria, 2013). Semakin besar ukuran sebuah perusahaan, maka akan semakin besar pula jumlah komite auditnya, dan praktik *tax avoidance* pada perusahaan akan semakin rendah. Berdasarkan hasil pengujian Uji Residual pada SPSS menunjukkan bahwa variabel *size* tidak dapat menjadi variabel moderasi dalam hubungan dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Kemungkinan karena variabel dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, maka hal tersebut dapat menyebabkan *size* tidak dapat dijadikan sebagai variabel moderasi.

Komite audit berfungsi memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian internal perusahaan (Sekar Mayangsari, 2003). Berjalannya fungsi komite audit secara efektif memungkinkan pengendalian pada perusahaan dan laporan keuangan yang lebih baik serta mendukung *good corporate governance*

(Ni Ketut, 2008). Semakin besar ukuran sebuah perusahaan, maka jumlah komite audit yang ada dalam perusahaan tersebut tentunya akan semakin besar pula, dan akan semakin rendah peluang untuk melakukan praktik *tax avoidance* pada perusahaan tersebut. Berdasarkan hasil pengujian Uji Residual pada SPSS menunjukkan bahwa variabel *size* tidak dapat menjadi variabel moderasi dalam hubungan komite audit terhadap *tax avoidance*. Kemungkinan karena variabel komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, maka hal tersebut dapat menyebabkan *size* tidak dapat dijadikan sebagai variabel moderasi.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji F diketahui bahwa model regresi *Fit* dan dapat diartikan bahwa variabel independen (kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit) dapat memprediksi variabel dependen (*tax avoidance*) pada perusahaan pertambangan periode 2012-2016.
2. Berdasarkan hasil dari koefisien determinasi (uji R^2) menyebutkan bahwa 5,6 persen variabel independen mampu mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan periode 2012-2016, sedangkan sisanya 94,4 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel independen yang diteliti.
3. Hasil pengujian hipotesis (uji t) dapat disimpulkan bahwa:
 - a. Hipotesis satu diterima, kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. Adanya

- kepemilikan institusional dalam sebuah perusahaan dapat mempengaruhi terjadinya praktik *tax avoidance*. Jika pengendalian yang dilakukan oleh pemilik institusional semakin kuat, maka perilaku manajemen internal perusahaan untuk melakukan kecurangan penggelapan keuangan termasuk penghindaran pajak akan semakin kecil.
- b. Hipotesis dua ditolak, dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. Adanya dewan komisaris independen dalam perusahaan tidak dapat mengurangi terjadinya praktik *tax avoidance*. Dewan komisaris independen yang besar dalam sebuah perusahaan tidak efektif dalam upaya pencegahan praktik *tax avoidance*.
 - c. Hipotesis tiga ditolak, komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. Hal ini berarti bahwa jumlah komite audit yang ada pada perusahaan tidak memiliki pengaruh atas tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen. Kemungkinan peran komite audit dalam mengawasi dan melakukan kontrol terhadap manajemen tidak dapat berjalan dengan baik karena rendahnya komite audit yang dimiliki oleh perusahaan pertambangan periode 2012-2016.
 - d. Hipotesis empat ditolak, *size* tidak dapat memoderasi hubungan antara kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. Kemungkinan hal ini dapat terjadi karena jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan dan jumlah kepemilikan institusional yang tidak stabil menyebabkan variabel *size* atau ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi hubungan antara kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
 - e. Hipotesis lima ditolak, *size* tidak dapat memoderasi hubungan antara dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. Kemungkinan hal ini dapat terjadi karena variabel dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, maka hal tersebut dapat menyebabkan *size* (ukuran perusahaan) tidak dapat dijadikan sebagai variabel moderasi.
 - f. Hipotesis enam ditolak, *size* tidak bisa memoderasi hubungan antara komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. Kemungkinan hal ini dapat terjadi karena variabel komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, maka hal tersebut dapat menyebabkan *size* (ukuran perusahaan) tidak dapat dijadikan sebagai variabel moderasi.

KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian yang telah dilakukan tentunya masih memiliki kekurangan yang menjadikan hal tersebut sebagai keterbatasan penelitian.

1. Keterbatasan penelitian ini terdapat pada hasil uji normalitas pertama dan kedua yang menjelaskan data tidak berdistribusi normal. Hal ini merupakan kendala ketika akan dilakukan uji hipotesis karena data yang disyaratkan harus terdistribusi normal, sehingga harus dilakukan *outlier* data.

2. Dalam penelitian ini ketiga variabel independen Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit hanya dapat menjelaskan variabel sebesar 5,6 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen rendah karena ≤ 50 persen.

SARAN

Dengan adanya keterbatasan penelitian yang telah disampaikan, maka peneliti memberikan saran untuk peneliti yang akan datang sebagai berikut:

1. Bagi peneliti dengan topik sejenis diharapkan untuk menggunakan variabel independen yang lebih luas yang memiliki keterkaitan dengan integritas laporan keuangan seperti CSR, kepemilikan manajerial, kualitas auditor, atau kompensasi rugi fiskal. Sehingga dapat mencakup penelitian yang lebih luas dan variabel independen lebih dapat mempengaruhi variabel tax avoidance.
2. Menggunakan variabel moderasi selain size, atau mencoba menggunakan variabel intervening.

DAFTAR RUJUKAN

- Agoes dan I Cenik Ardana. 2014. *Etika Bisnis dan Profesi*. Jakarta : Salemba Empat.
- BAPEPAM. 2012. *Salinan keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar modal dan Lembaga Keuangan, Nomor: kep-643/BL/2012 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik*. Jakarta.
- Desai, M.A., Dharmapala, D. 2007. *Taxation and Corporate Governance: An Economic Approach*. Harvard University, working paper. SSRN.
- Gideon Boediono Sb. 2005. *Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur. Simposium Nasional Akuntansi VII. Bali*.
- I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana. 2014. "Pengaruh *Corporate Governance*, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif pada *Tax Avoidance* Perusahaan Manufaktur". E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Volume 9, No. 2, Pp 525-539
- Imam Ghazali. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Jacob, Fatoki Obafemi FCA. 2011. "An Empirical Study of Tax and Tax Avoidance: A Critical Issue in Nigeria Economic Development, 5 (18), pp: 22-27.
- Jensen, M.C and Meckling, W.H. 1976. *Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs Ownership Structure. Journal of financial Economics*. V.3 No. 4, pp.305-360.
- Kesit Bambang Prakosa. 2014. "Pengaruh profitabilitas, kepemilikan keluarga, dan *corporate governance* terhadap penghindaran pajak".
- Mohammad Zain. 2005. *Manajemen Perpajakan Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rahmawati. 2012. *Teori Akuntansi Keuangan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sekar Mayangsari. 2003. Analisis Pengaruh Independensi, Kualitas Audit Serta Mekanisme Corporate Governance Terhadap Integritas Laporan Keuangan, Simposium Nasional Akuntansi VI, 16–17 Oktober, Surabaya.

Tommy Kurniasih dan Maria M. Ratna Sari. 2013” Pengaruh *Return on Assets, Leverage, Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada *Tax Avoidance*”.*Buletin Studi Ekonomi*, Vol 18, Hal. 58-66.

Vivi Adeyani. 2013.” Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*”.Disampaikan pada Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call Papers UNISBANK (SENDI_U)

Watts, R, L., and Zimmerman, J, L. 1986, *Positive Accounting Theory*. New York, Prentice Hall.

Wolfensohn, J. 1999. *Corporate Governance*. Financial Times.

www.pajak.go.id